

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sejahtera Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Vina Ervinda Mardani¹ Dr. Endang Indartuti² M.Si Dida Rahmadanik S.AP., M.AP³
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondence

Email: vinaervinda300@gmail.com

No. Telp:

Submitted 28 Juni 2024

Accepted 4 Juli 2024

Published 5 Juli 2024

Abstract

Poverty standards are usually measured by inadequate food and clothing needs and inadequate housing conditions. This is influenced by a lack of income while life continues and requires costs. Another thing that can influence poverty is that many people do not have a job and a steady income so they cannot fulfill their daily needs optimally. UPPKA is a productive economic business program consisting of a group of member-acceptor families who work together to improve the family's economic function so as to create a prosperous family economy. UPPKA aims to increase knowledge, skills, have an innovative and creative mindset and foster an entrepreneurial spirit in running a local product manufacturing business. The type of research used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. There are 9 indicators for the realization of Good Governance that are used, namely community participation, law enforcement rules, transparency, accountability, strategic vision, consensus-oriented, equality of principles, effectiveness and efficiency of governance and responsiveness. it has been implemented well. However, in terms of indicators of community participation in Tambaksari District, Surabaya City, there are still few who participate in the UPPKA program due to a lack of knowledge and understanding of what the UPPKA program is. There are many benefits of the UPPKA program for the community, namely increasing creativity and insight, apart from that it can also improve the family economy by earning income.

Keyword : *Acceptor family , UPPKA , Program*

Abstrak

Standart kemiskinan biasanya diukur dari kebutuhan sandang pangan yang kurang cukup serta keadaan papan yang tidak layak. Hal ini dipengaruhi dari kurangnya pendapatan sedangkan hidup terus berjalan dan membutuhkan biaya. Adapun hal lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. UPPKA merupakan program usaha ekonomi produktif yang terdiri dari sekelompok keluarga akseptor anggota yang bekerja sama untuk meningkatkan fungsi perekonomian keluarga sehingga mewujudkan perekonomian keluarga sejahtera. UPPKA bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, memiliki pola pikir inovatif dan kreatif serta menumbuhkan jiwa Entrepreneurship dalam menjalankan usaha pembuatan produk lokal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ada 9 indikator perwujudan Good Governance yang digunakan yaitu Partisipasi masyarakat, aturan penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, visi strategis, berorientasi pada konsensus, kesetaraan prinsip, efektivitas dan efisiensi tata kelola dan responsif. sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi untuk indikator partisipasi masyarakat di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ini masih sedikit yang berpartisipasi mengikuti program UPPKA dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai apa itu program UPPKA. Banyak sekali manfaat program UPPKA bagi masyarakat yaitu menambah kreativitas dan wawasan selain itu juga dapat memperbaiki perekonomian keluarga karena mendapatkan penghasilan.

Kata Kunci : *Keluarga Akseptor, UPPKA , Program*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Menurut PBB State of World Population 2023, Indonesia menduduki peringkat ke 4 di bawah negara India, China dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 277,5 juta jiwa. BPS (Badan Pusat Statistik) juga menyampaikan bahwa jumlah penduduk



naik sebesar 1,13% dari tahun 2022 dan akan terus bertambah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 190,98 juta jiwa (69,25%) masuk kategori usia produktif (usia 15-64 tahun), sedangkan 84,8 juta jiwa (30,75%) tergolong usia tidak produktif (INDONESIA MENURUT PBB WORL - Penelusuran Google, n.d.)

Surabaya merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 2.893.698 jiwa. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara tingginya jumlah penduduk dengan luas daerah yang ditempati sehingga tidak seimbang dan menyebabkan ketidaknyamanan. Tingginya kepadatan penduduk tanpa diimbangi peningkatan kualitas SDM tentunya memiliki dampak munculnya permasalahan kependudukan. Permasalahan yang pertama adalah kemiskinan. Ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka mereka dianggap berada dalam kemiskinan. Angka kemiskinan di Surabaya menurun menjadi 4,72 persen pada tahun 2022 (sekitar 138,21 ribu orang), 4,65 persen pada tahun 2023 (sekitar 136,37 ribu orang), dan 5,23 persen pada tahun 2021 (sekitar 152,49 ribu orang)

Standart kemiskinan biasanya diukur dari kebutuhan sandang pangan yang kurang cukup serta keadaan papan yang tidak layak. Hal ini dipengaruhi dari kurangnya pendapatan sedangkan hidup terus berjalan dan membutuhkan biaya. Adapun hal lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal.

Tingginya kepadatan penduduk serta terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan mengakibatkan tingginya tingkat persaingan dan kesempatan bekerja cenderung menurun. Hal lain yang dapat mempengaruhi terjadinya pengangguran adalah kualitas SDM yang rendah terutama di bidang pendidikan. Orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan dibanding dengan yang pendidikan tinggi. Untuk dapat mengurangi angka pengangguran yang tinggi ada dua opsi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu memperbaiki kualitas SDM contohnya pada bidang pendidikan serta mengasah dan meningkatkan skill yang dimiliki. Sedangkan opsi yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan baru contohnya seperti membuka usaha/dagang. Selain untuk mendapatkan penghasilan sendiri, membuka usaha/dagang dapat juga membantu membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. (Penyebab Kepadatan Penduduk Di Surabaya - Penelusuran Google, n.d.). Oleh karena itu pemerintah memberikan jalan tengah agar kepadatan penduduk tidak meningkat setiap tahunnya. Salah satu program yang diadakan pemerintah adalah program KB (Keluarga Berencana). Menurut UU No.10 Tahun 1992 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah menekan angka pertumbuhan penduduk. Program KB ini dikatakan dapat membantu menangani tingkat pertumbuhan penduduk. Pembuatan program KB oleh pemerintah ini bertujuan untuk mengatur kehamilan, jarak kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Hal ini tentunya sudah dipertimbangkan oleh pemerintah terkait dampaknya dari faktor kesehatan dan faktor ekonomi. Oleh sebab itu dalam program KB ini tidak hanya membutuhkan peran dari pemerintah saja, justru peran dan kesadaran dari masyarakat sendiri sangat penting untuk menunjang keberhasilan program KB ini.

Pemerintah Kota Surabaya menyatakan bahwa penentuan jumlah anggota keluarga merupakan langkah awal dalam membangun keluarga sejahtera. Karena orang tua dapat memberikan seluruh perhatiannya kepada anak-anaknya—termasuk pendidikannya—berkat pemikiran awal ini. Menyukkseskan anak merupakan salah satu pendekatan orang tua dalam membangun keluarga kaya. Terlepas dari pencapaian pendidikan tertinggi, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sampai mereka memulai sebuah keluarga.



Program UPPKA (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) merupakan salah satu inisiatif yang dirancang untuk mendukung program keluarga berencana. Merupakan upaya pemerintah untuk membentuk keluarga berkualitas dan meningkatkan fungsi keuangan guna mencapai kemandirian ekonomi keluarga di Kota Surabaya. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menjadi tuan rumah program UPPKA. Dalam rangka pelaksanaan NKKBS, pada tahun 1979 diciptakan program UPPKA (Kenormalan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).

Namun menjadi UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) pada tahun 1994. Sekali lagi berubah menjadi UPPKA (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) sesuai Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2020. Peraturan BKKBN Nomor: 332/HK.010/F3/2008 yang memuat pedoman pelaksanaan prakarsa peningkatan pendapatan keluarga melalui dukungan modal usaha bagi kelompok UPPKS, menjadi landasan hukum pengelolaan UPPKS. Menggunakan sumber pembiayaan seperti Kredit BRI, PNPM Mandiri, dan sumber permodalan lainnya (Nani et al., 2019)

Sekelompok keluarga akseptor berkolaborasi untuk meningkatkan fungsi ekonomi keluarga guna mewujudkan perekonomian keluarga yang sejahtera, menjadikan UPPKA sebagai program usaha ekonomi yang bermanfaat. UPPKA berupaya mengembangkan pengetahuan, kemampuan, pola pikir kreatif dan inventif, serta jiwa kewirausahaan dalam rangka mengelola usaha pembuatan produk lokal. Peserta KB, yang mempertimbangkan KB, dan keluarga akseptor merupakan UPPKA. Keluarga yang menerima dan ikut serta dalam penyelenggaraan program KB disebut keluarga akseptor..

Dalam rangka memperkuat fungsi ekonomi keluarga dan menjamin penerimaan masyarakat terhadap program KB Pemerintah Kota Surabaya, petugas BKKBN bersama Ketua Dekranasda (Dewan Ketenagakerjaan Nasional) Surabaya mengadakan Bazar Produk Bagi Peserta Pelatihan Usaha Penerima Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKA), salah satunya berada di Kecamatan Tambaksari, tepatnya di Taman Mundu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dapat memberikan deskripsi dan gambaran pada Program yang akan penulis teliti dengan judul Evaluasi program kampung unggulan , untuk memastikan kualitas Program kampung unggulan dari proses penelitian. (Friadi 2014)

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bermanfaat untuk mengenalkan program UPPKA kepada masyarakat, terutama keluarga akseptor, peserta KB, calon peserta KB . Mereka berkesempatan mendapatkan penghasilan tambahan walaupun hanya di rumah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jika ekonomi meningkat maka masyarakat juga dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Program UPPKA ini merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran usaha ekonomi dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha. Untuk menerapkan efektivitas tata kelola program UPPKA, Teori *Good Governance* menjadi tolak ukur fokus penelitian ini. Ada 9 indikator perwujudan *Good Governance* yang harus dipegang dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

1. **Partisipasi Masyarakat**, merupakan hal utama dalam keberhasilan jalannya program ini. Masyarakat dapat berperan menjadi penerima program, menjalankan program serta

dapat mengevaluasi dan memberikan hasil terhadap bagaimana tata kelola program yang sedang dijalankan.

2. **Aturan Penegakan Hukum**, berkenaan dengan undang-undang yang berlaku, berjalannya program juga harus berpedoman pada hukum.
3. **Transparansi**, dibangun atas dasar informasi yang ada. Seluruh proses pemerintahan, lembaga/lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat.
4. **Akuntabilitas**, atau pertanggungjawaban secara penuh pemerintah terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk megawasi kepentingan mereka dalam menjalankan program.
5. **Visi Strategis**, merupakan pandangan strategis pemerintah dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik sebagai pembangunan sumber daya manusia.
6. **Berorientasi Pada Konsensus**, keputusan apapun yang terjadi di dalam program tersebut harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan ini dapat memuaskan kedua belah pihak
7. **Kesetaraan Prinsip**, kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai dalam melaksanakan sebuah program.
8. **Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola** yang efektif tidak lepas dari sangkut paut pemerintahan, maka para pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat
9. **Responsif**, kepedulian pemerintah melayani masyarakat yang berkepentingan dalam proses berjalannya program tersebut.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dengan dasar pertimbangan penentuan lokasi karena guna mendukung program UPPKA sebagai upaya pemerintah membentuk keluarga yang berkualitas guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang memiliki tujuan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Informasi yang dihasilkan dari penyajian data diberikan secara singkat, sederhana dan mudah dipahami. Dalam penyajian data ini diperoleh dari wawancara kepada 4 (empat) narasumber yaitu Ibu Nisma selaku petugas BKKBN, serta Ibu Ida, Ibu Hariyani dan Ibu Marsini selaku keluarga akseptor yang mengikuti program UPPKA di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. UPPKA merupakan kelompok kegiatan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga. Tujuan Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah untuk meningkatkan ketahanan finansial dan kemandirian keluarga.

DISKUSI

Penelitian dilakukan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya mengenai penerapan prinsip good governance dalam program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) sebagai upaya menciptakan keluarga yang sejahtera. Temuan penelitian dijelaskan



secara rinci dengan Sembilan indikator yang digunakan untuk keberhasilan penerapan prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat, aturan penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, visi strategis, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta responsif. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dibahas pada bagian selanjutnya.

1. **Partisipasi Masyarakat** Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan haknya untuk secara langsung maupun tidak langsung menyuarakan pemikirannya dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat.. Dalam good governance partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan berjalannya suatu program. Tanpa adanya partisipasi dalam masyarakat, tidak mungkin suatu program bisa berjalan. Salah satunya yaitu program UPPKA yang berjalan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
2. **Aturan Penegakan Hukum**, dengan prinsip bahwa aturan penegakan hukum harus konsisten dan tidak diskriminatif, independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diterapkan tanpa diskriminasi, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia . Dalam aturan penegakan hukum yang diterapkan dalam program UPPKA yang ada di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya bisa dikatakan baik-baik saja. Karena selama berjalannya program UPPKA ini, masyarakat tidak ada yang melanggar hukum ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan hasil penyajian data bahwa selama program UPPKA berjalan tidak ada masyarakat yang melanggar aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga.
3. **Tranparansi** Pertukaran informasi yang tidak terbatas merupakan landasan transparansi. Semua lembaga, prosedur, dan data pemerintah harus terbuka untuk publik, dan data yang tersedia harus memadai untuk pengawasan dan pemahaman. guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi yang dimaksud dalam program UPPKA di Kecamatan Tambakasari Kota Surabaya ini adalah pemerintah memberikan informasi secara terbuka dan apa adanya pada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui informasi apa yang ada dalam lingkup pemerintah sebagai acuan keberhasilan berjalannya program tersebut. Masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui informasi apa yang ada dalam lingkup pemerintah sebagai acuan keberhasilan berjalannya program tersebut. Program UPPKA berjalan pemerintah sudah memberikan data yang sangat transparan dan apa adanya kepada masyarakat melalui sosialisasi berupa jumlah bantuan yang diterima dan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. **Akuntabilitas** Pegawai negeri mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat yang memberinya kekuasaan untuk mengelola kepentingannya. Peraturan dan regulasi yang ada, serta komitmen politik terhadap akuntabilitas dan sistem akuntabilitas, merupakan alat dasar akuntabilitas. Akuntabilitas dalam program ini juga merupakan faktor penting yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan program UPPKA yang dilaksanakan di Kecamatan tambaksari Kota Surabaya. Pemerintah bertanggung jawab penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program
5. **Visi Strategis** Perspektif strategis untuk masa depan dikenal sebagai visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memandang pembangunan manusia dan tata pemerintahan yang baik dari perspektif jangka panjang yang luas. Visi strategis merupakan rencana kedepan masyarakat untuk program UPPKA yang sedang berjalan



saat ini. Masyarakat berharap program UPPKA ini terus berjalan dan diperbaiki lagi karena sangat membantu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Petugas BKKBN sudah bertanggung jawab penuh atas keberhasilan program UPPKA ini dan selalu memantau proses berjalannya program UPPKA tersebut.

6. **Berorientasi Pada Konsensus** Sesuai dengan asas konsensus, setiap keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat setelah melalui pertimbangan yang matang. Proses pengambilan keputusan ini dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dan menghasilkan keputusan bersama yang mengikat/. Berorientasi pada konsensus juga dapat dikatakan sebagai pengambilan keputusan secara musyawarah. Selama berjalannya program UPPKA di Kecamatan Tambaksari masyarakat mengaku selalu dilibatkan dalam pengambilan setiap keputusan. Penerapan prinsip berorientasi pada konsensus ini dikatakan berjalan dengan baik karena petugas BKKBN selalu bermusyawarah dan melibatkan masyarakat terkait keputusan apa yang akan diambil untuk keberhasilan berjalannya pengelolaan program.
7. **Prinsip Kesetaraan** Prinsip kesetaraan menjamin masyarakat dan pemerintah saling percaya dengan memberikan informasi dan kemudahan mengakses informasi yang cukup dan benar. Kesetaraan yang dibicarakan adalah terjalannya timbal balik positif dan rasa saling percaya antara negara dan rakyat/. Dalam program UPPKA ini, pemerintah sudah percaya penuh kepada masyarakat bahwa masyarakat dapat menjalankan program ini dengan baik. Prinsip kesetaraan ini merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan program UPPKA, karena dalam prinsip kesetaraan ada pemerintah dan masyarakat yang saling percaya bahwa program ini akan berhasil, serta masyarakat dan pemerintah saling memberikan timbal balik yang baik antara satu sama lain.
8. **Dalam Prinsip Efektivitas dan Efisiensi**, Dalam prinsip efektivitas dan efisiensi, yang dimaksud efektif adalah penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, sedangkan efisien artinya penyelenggaraan yang dilakukan dengan tepat dengan tujuan keberhasilan dan berdaya guna. Program UPPKA ini sudah cukup efektif dan efisien bagi masyarakat karena sudah sangat membantu meningkatkan taraf hidup mereka.
9. **Prinsip Responsif/Kepedulian** dapat diartikan sebagai kepedulian pemerintah melayani masyarakat yang berkepentingan dalam seluruh proses dalam konteks praktek usaha. Responsif yang dimaksud adalah daya tanggap pemerintah terhadap masyarakatnya. Memberikan respon yang cepat dalam menanggapi masalah yang ada merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan indikator responsive. Responsibilitas dari pemerintah terkait berjalannya program UPPKA ini adalah sangat cepat dan tanggap, tapi pemerintah tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sejahtera Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Penerapan Prinsip Good Governance menggunakan Sembilan indikator yaitu partisipasi masyarakat, aturan penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, visi strategis, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, responsif dalam pelaksanaan program



UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi untuk indikator partisipasi masyarakat di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ini masih sedikit yang berpartisipasi mengikuti program UPPKA dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai apa itu program UPPKA. Banyak sekali manfaat program UPPKA bagi masyarakat yaitu menambah kreativitas dan wawasan selain itu juga dapat memperbaiki perekonomian keluarga karena mendapatkan penghasilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan peneliti, ada saran untuk keberhasilan program UPPKA di Kota Surabaya yaitu sebaiknya petugas BKKBN sering mengadakan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat kota Surabaya tentang manfaat program UPPKA melalui cara seperti mendatangi perkumpulan ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) agar lebih banyak ibu-ibu yang mau mengikuti program KB dan menjadi keluarga akseptor khususnya berpartisipasi dalam program yang diadakan oleh BKKBN yaitu Program UPPKA yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- “1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur | 2023.” 2023. : 1–78.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. 2023. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 1–9.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya. 2021. “Rencana Strategis Pemerintah Kota Surabaya.” <https://dinkopdag.surabaya.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Renstra-2021-2026-Dinkopdag.pdf> (1): 1–169.
- Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih, S.Si., M.Si., and S.Si., M.Si. Dr. R. Bagus Fajriya Hakim. 2017. “Prinsip Dasar Penyajian Data.” *Modul 01*: 1–40.
- Fika, Nurul et al. 2023. “Analisis Kebijakan Versi William Dunn Dalam Pondok Pesantren Modern.” *Journal on Education* 05(04): 16737–47.
- Mukhrilal, S, and M Ip. 2022. “EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN GAMpong JAWA KECAMATAN KUTA RAJA KOTA BANDA ACEH The Effectiveness Of The Kampung Keluarga Program Plan To Reduce The Poverty Rate
- Perindustrian, Dinas, and D A N Perdagangan. 2015. “Renja 2015.”
- Purwaningsih, Ayu, and Weni Rosdiana. 2018. “Dampak Program Kampung Unggulan Di Kampung Tempe, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.” *Publika* 6(4).
- Rijali, Ahmad. 2018. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin.” 17(33): 81–95.
- Rizky Nandya Bayualdi, Yonandika. 2017. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Unggulan Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kampung Tempe Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya).” *Publika* 5(2): 1–6.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. “Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9(4): 505–30.
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.
- Yunida, E. 2017. “Evaluasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.” : 1–23.



